

BEBERAPA MASALAH KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN PEDESAAN

Rufinus LAHUR*

Sehubungan dengan adanya keputusan untuk melaksanakan koran masuk desa beberapa waktu yang lalu,¹ maka muncul pelbagai reaksi; banyak pihak menyambutnya dengan positif, terutama pejabat di daerah. Tampak begitu banyak harapan yang ditumpahkan pada koran masuk desa ini. Pada pihak lain ada juga yang menyangsikan peranan dari koran masuk desa ini, terutama dihubungkan dengan kemampuan pengelolaan aparatur kecamatan dan desa, berikut kurangnya minat baca masyarakat termasuk kepala desa dan perangkatnya, sehingga koran masuk desa bakal bermuara di pasar loak untuk dikilokan.

Saya tidak bermaksud ikut memilih salah satu dari kedua posisi sikap tersebut di atas. Akan tetapi condong berusaha untuk meletakkan koran masuk desa dalam ruang lingkup yang lebih luas. Walaupun hanya sepiantas kilas. Pertama-tama koran dilihat sebagai bagian dari komunikasi massa serta desa dilihat sebagai bagian dari pengembangan pedesaan, yang juga sangat luas. Pemilihan ini bukan untuk mengaburkan masalah, akan tetapi semata-mata berusaha untuk meletakkan tempat dan arah dari koran masuk desa, sehingga dari situ mungkin dapat dilihat apa sebenarnya makna dari koran masuk desa ini dan apa yang seharusnya bakal menjadi tindak lanjutnya.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa media massa serta pengembangan pedesaan semakin menonjol, dan kiranya akan tetap berperan demikian pada masa yang akan datang, sebagai kekuatan yang utama.

Atas dasar pertimbangan ini saya akan mengemukakan terlebih dahulu peranan komunikasi, kemudian masalah pengembangan

* Staf CSIS

¹ Lihat Keputusan Sidang Pleno XXI Dewan Pers, yang berlangsung tanggal 18-20 Februari 1980 di Bandung, *Antara*, 22 Februari 1980

pedesaan dan kondisi sistem komunikasi di sementara desa di Indonesia berikut beberapa catatan penutup yaitu beberapa masalah yang berhubungan dengan komunikasi pembangunan.

MASALAH KOMUNIKASI

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi berikut teknologi komunikasi di negara maju, maka dunia kita ini semakin menjadi satu dan kecil. Apalagi perkembangan teknologi di negara maju sudah melangkah pada teknologi intelektual (intellectual technology) dengan sumber strategis (strategic resource) ilmu pengetahuan. Pola (design) kegiatan mereka sudah tidak sekadar menggarap alam atau barang industri akan tetapi industri menggarap manusia dengan berorientasi ke depan.¹ Dari kegiatan padat modal mereka bergeser pada kegiatan padat otak (brain intensive). Keunggulan dari negara maju ini pada dasarnya merupakan kekuasaan yang siap mereka pakai untuk mempengaruhi lingkungannya sesuai dengan kepentingan nasional mereka masing-masing, pada bidang apa saja.

Salah satu segi dari penguasaan itu ialah bidang informasi komunikasi, baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) yaitu program informasi pada pelbagai bidang, baik mengenai bangsa mereka sendiri, maupun masyarakat bangsa lain, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Dan setiap saat pesan komunikasi terus mengalir terutama dari negara maju ke negara berkembang, melalui media apa saja. Sedangkan negara berkembang rupanya sekadar menjadi obyek dan konsumen informasi belaka, tergantung pada negara maju.

Rupanya pemimpin masyarakat negara berkembang semakin sadar akan situasi komunikasi dunia yang mempunyai banyak ketimpangan yang serius ini. Perdana Menteri Malaysia² misalnya pernah

1 Daniel Bell, 'Communications Technology for Better or for Worse', *Harvard Business Review*, May-June 1979, p. 26

2 Pidato Perdana Menteri Malaysia Dato' Hussein Onn pada upacara Pembukaan Konperensi Antara Pemerintahan dari UNESCO, tentang Kebijaksanaan Komunikasi di Asia dan Oceania bulan Pebruari 1979 di Kuala Lumpur

mengemukakan bahwa "kita harus berjuang untuk membuatnya seimbang, sehingga negara berkembang tidak harus tergantung secara tanpa batas pada agen berita negara maju". Apa lagi ia mensinyalir bahwa negara berkembang "merupakan sasaran dari agen berita negara maju, di mana kebijaksanaan dan kegiatan negara berkembang diputar-balikkan (twisted) dan diberi interpretasi yang jelek; gambaran diri (image) negara berkembang sering mereka lukiskan dengan warna yang sehitam mungkin".

Ini sekadar ilustrasi. Tetapi intinya ialah bahwa isi pesan dari komunikasi yang terus melanda dan membanjir ini pasti akan menentukan tingkah laku atau barang kali juga ciri-ciri dan watak masyarakat negara berkembang pada waktu yang akan datang.

Apakah ciri-ciri itu nanti akan sesuai dengan kepentingan nasional bangsa tersebut, atau akan lebih sesuai dengan kepentingan pihak luar yang mengirim informasi, tidak ada yang dapat memastikannya, apalagi menjaminnya. Akan tetapi adanya pelbagai kemungkinan itu sudah patut dan seharusnya dilihat sekarang ini. Paling tidak kita harus menyadari bahwa ada kekuatan raksasa yang sedang diam-diam mempengaruhi kita secara intensif dan halus dan bakal menjadi kekuasaan dunia pada masa depan, yaitu informasi komunikasi yang sekarang ini sedang leluasa menembus batas negara, bangsa baik di kota maupun di desa. Sehingga tidak mustahil kelak, bahwa kekuasaan dan kedaulatan para negara lebih bersifat formal belaka daripada substansial. Adagium yang berbunyi siapa yang menguasai pemuda menguasai masa depan, atau pemuda adalah harapan masa depan, mungkin akan menjadi tertawaan orang, sebab mungkin orang sudah mengatakan siapa yang memiliki kemampuan memanipulasi informasi komunikasi akan memiliki masa depan. Jadi masa depan rupanya bukan milik dari mereka yang hanya berorientasi pada masa silam, akan tetapi lebih merupakan wilayah kekuasaan dari mereka yang berorientasi ke depan dengan menguasai informasi komunikasi hari ini.

Masalahnya bagi kita, bukanlah bagaimana menutup diri dari pen-jaringan informasi komunikasi yang ada, karena hal itu memang tidak mungkin; akan tetapi bagaimana kita sebagai bangsa menyiapkan diri, untuk berkemampuan mengunyah informasi yang ada, membuang yang tidak berguna dan mengambil yang bermanfaat, demi memperkaya budaya bangsa kita sendiri. Dengan demikian gelombang

pengaruh luar itu tidak perlu mencabutkan manusia Indonesia dari landasan budaya dan kepentingan nasionalnya.

Karena itu sebagai bangsa kita harus tahu diri. Bahwa dalam konstelasi sekarang ini, Indonesia merupakan salah satu "the have-not" dan "the knowledge-have-not countries", yang secara terus-menerus mengimpor ilmu dan teknologi dari negara maju. Pola semacam ini akan menjadi ketergantungan abadi jika kita tidak dapat mengembangkan kemampuan sendiri untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu sekarang ini sebenarnya, bukan lagi bagaimana mengimpor/mentransfer ilmu atau informasi dari negara maju, akan tetapi yang teramat penting ialah bagaimana menggerakkan dan mendinamiskan suatu sistem yang mampu mulai menghasilkan ilmu dan teknologi sendiri, bagaimanapun kecilnya.

Dari sini mungkin dapat dilihat bahwa kebanggaan dari sementara negara berkembang akan kemajuan berdasarkan pinjaman ini, apa itu ilmu atau teknologi komunikasi misalnya, adalah kebanggaan semu dan sementara sifatnya. Sekedar kebanggaan tentu boleh saja, akan tetapi janganlah kita bertepuk dada seolah-olah kita memang berhasil. Tetapi sebaliknya, "kebanggaan" ini harus diisi penuh dengan keprihatinan yang sungguh-sungguh, bahwa kita harus segera mulai menumbuhkan sesuatu dari bawah dan dari dalam. Karenanya dalam memulai pengembangan ilmu dan teknologi termasuk komunikasi informasi ini, tidak boleh hanya memakai perhitungan untung rugi sekarang ini secara material seperti "the cost-effectiveness" akan tetapi juga yang berhubungan dengan kepercayaan kepada kemampuan diri sebagai bangsa, paling tidak pada masa depan, yang mungkin lebih berhubungan dengan nilai. Bagaimanapun mahal harganya, dengan ukuran rupiah, namun tidak ada kemungkinan lain daripada menumbuhkan ilmu dan teknologi yang berakar dalam budaya dan kepentingan masyarakat kita sendiri.

Sedang kita bingung untuk memulai atau tidak, lengkap dengan segala prioritas dan keterbatasan kemampuan yang kita miliki, proses komunikasi terus berlangsung. Baik komunikasi yang secara sadar dan berencana kita lakukan maupun yang tidak. Komunikasi yang secara sadar direncanakan mungkin saja tidak memenuhi sasaran malah barang kali banyak akibat sampingan yang berada di luar dugaan serta tidak diharapkan.

Bayangkan, bagaimana akibat dari aneka proses komunikasi yang berlangsung tanpa kita sadar dan rencanakan baik dari dalam negeri, maupun dan apalagi yang datang dari luar negeri. Hasilnya mungkin berada di luar daya khayal kita semua. Gejala-gejalanya sekarang ini tampak di mana-mana. Hanya barang kali kurang kita perhatikan. Misalnya, nafsu konsumsi barang mewah meningkat. Walaupun mungkin di luar kebutuhan dan kemampuan. Orang merasa malu, segan dan mungkin merasa tidak wajar kalau misalnya memakai pakaian dari daerahnya. Saya belum pernah melihat orang Indonesia memakai dasi dari batik, juga dari mereka yang sejak kecil berkebudayaan batik. Orang Yogya dan Solo semakin enggan memakai lurik dan blangkon. Pakaian asli, adat atau daerah atau entah apa namanya, dipakai untuk pameran hari raya. Dan banyak orang Indonesia berkerumun menontonnya, tidak bedanya seperti turis. Mereka tertarik mungkin karena merasa aneh. Tetapi barang-barang yang bukan merupakan cermin budayanya, malah lebih dirasa wajar. Dan entah apalagi. Seolah-olah hendak mengatakan bahwa barang dari budaya sendiri "tidak wajar" sedangkan yang lainnya "natural" dan sreg. Kalau anda mau sedikit berkhayal untuk memproyeksikan gejala ini maka tampak lambat laun masyarakat kita dicabut atau dikatakan diasingkan dari kebudayaannya sendiri. Dan lambat laun orang Indonesia bisa menjadi asing di tanah airnya sendiri. Mudah-mudahan saya salah dan mengada-ada. Akan tetapi kalau gejala itu ada mengandung kebenaran, bukankah itu lampu merah tanda bencana?

PENDEKATAN SEMAKIN MENDASAR TERHADAP MASALAH PENGEMBANGAN PEDESAAN

Dunia pedesaan akan semakin menonjol peranannya pada masa yang akan datang. Hampir semua negara berkembang telah menyadarinya. Hal mana tampak pada pelbagai usaha pokok yang telah dilakukan. Di Pilipina misalnya sesudah tahun 1972, telah diadakan usaha intensifikasi "land reform"; usaha yang semacam itu juga dilaksanakan di Sri Langka. Di India sudah dimulai sebagai bagian dari Repelitanya yang kelima tahun 1974, yaitu apa yang dikenal sebagai "the national programme of minimum needs". Tahun 1972, Pakistan memulai apa yang mereka namakan Integrated Rural Development Programme, yang bermaksud memperbaiki keadaan sosial ekonomi dari petani kecil dan menengah dengan cara memperbesar produktivitas usaha petani

dengan menyediakan antara lain bantuan teknis, supervisi kredit, fasilitas pemasaran dan sebagainya. Di Republik Korea dilancarkan apa yang mereka namakan Saemaul Undong yaitu New Community Development sejak tahun 1971; dengan tujuan membangun perubahan sikap masyarakat pedesaan dan memperbaiki lingkungan fisik dan standar hidup petani melalui pelbagai proyek yang penentuannya diputuskan sendiri oleh masyarakat setempat. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan secara gotong-royong dengan dibantu oleh badan pemerintah setempat baik berupa subsidi maupun dengan pinjaman. Bangladesh akhir-akhir ini memulai pembangunan desanya dengan apa yang mereka namakan Swanirwar Bangladesh Programme atau self-reliant approach to rural development. Perhatian yang serupa juga di Kamboja, Iran, Malaysia dan sebagainya, seperti halnya juga di negara kita.

Dari contoh-contoh ini mulai tampak adanya perhatian yang sungguh-sungguh dan mendasar kepada pengembangan pedesaan.¹ Desa tidak saja sebagai titik berat atau sekedar orientasi dari pembangunan, akan tetapi tampak suatu dimensi baru, di mana masyarakat pedesaan semakin diposisikan sebagai titik tolak memandang masalah, lingkungan dan masa depan. Populasi desa yang selama ini dianggap sebagai "beban" pembangunan, tengah berubah dan dilihat sebagai kemampuan potensial sumber daya manusia yang menyongsong dan membina masa depannya. Desa tidak lagi dianggap sebagai obyek "belas kasihan" dan macam-macam usaha "sosial" masyarakat kota, akan tetapi perlahan muncul sebagai komponen penanggung jawab yang sadar akan hak dan kewajiban dalam memikul sejarah bangsanya.

Memang adanya dua kubu dalam tubuh bangsa, yaitu masyarakat kota yang mendapat banyak kemudahan (fasilitas) dan masyarakat desa yang paling minim mengenyam kemudahan dalam alam kemerdekaan, merupakan cacat dari wajah perkembangan politik negara berkembang umumnya,² dan tidak terkecuali di negara kita. Struktur ini, yaitu perbedaan antara kota dan desa yang kontras, mungkin diperlukan oleh penjajah demi melanggengkan penjajahan; tetapi

1. United Nations Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 1976, Bangkok 1977, p. 42

2. Arnold Toynbee, *Surviving the Future*, London Oxford University Press, New York Toronto, 1971, p. 10

sayangnya struktur yang tidak sehat ini diteruskan oleh rezim negara berkembang, tanpa perubahan yang berarti. Akhir-akhir ini seperti diilustrasikan di atas kebijakan yang kota sentris ini mulai dipertanyakan, dan perhatian kepada desa tampaknya mulai mendasar. Isyarat-isyarat sudah mulai tampak. Walaupun belum begitu jelas dan tegas. Orang-orang, juga di Indonesia sudah banyak yang mulai omong-omong tentang pengembangan pedesaan dari dalam dan dari bawah; pembangunan terpadu, menyeluruh dan sebagainya. Bagaimana perumusan pendekatan mendasar ini secara operasional, mungkin masih membutuhkan waktu.

Sejauh yang berhubungan dengan proses pencerdasan kehidupan bangsa, misalnya melalui media massa, sudah mulai tampak adanya usaha akhir-akhir ini yang lebih dikenal dengan koran masuk desa, yang secara fisik berarti bertambahnya lagi saluran untuk mengalirnya pesan secara vertikal, yaitu dari atas atau dari kota (ibu kota) ke desa, di samping radio, televisi, dan lain-lain turba pejabat. Yang kurang adalah arus informasi horisontal; yaitu antara elite pada pelbagai tingkatan, antara desa, antara kabupaten, dan antara propinsi; arus informasi horisontal ini dalam dirinya juga merupakan arus informasi dari bawah ke atas. Aliran informasi yang terakhir ini memang sangat kurang sekarang ini, jika dibandingkan dengan arus dari atas.

Akibat komunikasi yang timpang ini maka timbul gejala yang tidak wajar; akibat kurangnya informasi komunikasi horisontal/dari bawah ke atas, pengetahuan kita umumnya tentang desa masih kabur dan kurang spesifik. Hal ini dapat dimengerti apalagi mengingat begitu beragamnya desa-desa kita yang berbasiskan 200 suku bangsa, tersebar pada lebih dari 992 pulau besar dan kecil,¹ yang sekarang ini meliputi lebih dari 60.000 desa. Sebagai anak dari ketimpangan komunikasi ini maka suatu daerah mungkin saja mengetahui banyak tentang Jakarta (dan karenanya dalam batas tertentu berusaha meniru gayanya)² akan tetapi pengetahuan tentang daerah tetangga, apalagi daerah lain umumnya hampir tidak ada. Lebih lucu lagi kalau warga suatu daerah

1 Menurut Statistik Indonesia 1977-1978 yang diterbitkan oleh BPS Jakarta, bahwa dari 13.667 pulau di Indonesia, hanya 992 (7%) yang berpenduduk; dan 12.675 dikatakan tidak ada penghuninya

2 Seio Sumardjan, 'Perkembangan Kebudayaan Nasional dan Daerah di Indonesia', *Budaya Jaya*, 131 Tahun Keduabelas — April 1979

lebih banyak mengenal Jakarta dari daerahnya sendiri. Dan mungkin saja kalau mereka ingin mengetahui daerah lain atau daerahnya sendiri, sering kali yang menjadi sumber ialah informasi dari luar negeri. Alhasil, kita mengetahui sesama melalui kaca mata orang lain. Bukan hanya itu, kalau mau mengetahui pemikiran politik pemimpin bangsa sendiri bahkan autobiografi presidennya sendiri harus melalui kaca mata orang asing pula. Anehnya gejala semacam ini kita anggap wajar... Kalau ini ada benarnya, lantas apa sebenarnya pengaruh yang sedang berlangsung dalam tubuh bangsa kita ini?

Pertanyaan yang paling elementer ialah kapankah kita ini dapat menjadi sumber informasi bagi diri kita sendiri, daerah kita sendiri, dan bangsa kita sendiri?

Kurangnya perhatian terhadap masalah kita sendiri khususnya pedesaan ini juga tampak dari sangat kurangnya ahli pedesaan di negara ini khususnya sosiologi pedesaan (rural sociologist), walaupun lebih dari 360 perguruan tinggi (swasta dan negeri) tersebar di seluruh propinsi dan bahkan juga di daerah tingkat II yang terpencil. Bagaimana kita dapat membangun pedesaan kalau lembaga ilmiah dan kaum intelektual kurang tertarik pada masalah pedesaan. Mudah-mudahan usaha fungsionalisasi perguruan tinggi yang akhir-akhir ini digalakkan melalui NKK pada gilirannya dapat juga memfungsionalkan dunia pedesaan kita. Ini tentu jangka panjang. Langkah-langkah jangka dekat juga sudah dimulai antara lain dengan menghidupkan koran daerah. Mengingat koran daerah ini adalah koran dari daerah dan bukan koran masuk daerah, seyogyanya ia sanggup mencerminkan ciri-ciri daerahnya yang khas. Selama ini koran yang terbit di daerah, tidak begitu banyak bedanya dengan koran yang terbit di Jakarta. Paling tidak menonjol sifatnya yang kota sentris. Sehingga mereka sebenarnya lebih merupakan koran Jakarta yang kebetulan terbit di ibu kota propinsi. Desa, tetap merupakan wilayah yang terlupakan. Mencari ciri yang sesuai dengan kekhasan daerahnya masing-masing, merupakan kegiatan utama dari koran daerah. Sehingga dari koran daerah, masyarakat daerah itu bahkan daerah lain serta pemerintah pusat terus mendapat informasi mengenai masalah daerah, berikut kebutuhan dan kemampuannya.

Dengan demikian segala kebijakan dari pusat untuk daerah-daerah dapat lebih terarah, konkrit, kena sasaran, dan karenanya sesuai dengan kebutuhan daerah dan tepat pada waktunya. Di samping itu masing-masing daerahpun dapat saling belajar dari pengalaman daerah lainnya.

Dari uraian di atas tampak bahwa, sejauh mengenai arus informasi komunikasi kita membutuhkan informasi vertikal, dari atas ke bawah terutama dalam rangka pemantapan dan pengembangan informasi sebagaimana seharusnya dalam negara kesatuan yang telah memiliki konstitusi dan ideologi nasional tertentu. Ini perlu sekali. Di samping komponen pertama dan utama ini kita juga sangat memerlukan jenis informasi lain, yaitu komunikasi horisontal yang pada dirinya juga merupakan informasi dari bawah ke atas. Kedua jenis informasi ini saling melengkapi, saling memperkaya dan mencerminkan dinamika bangsa yang bhinneka tunggal ika ini.

Untuk itu diperlukan penciptaan iklim yang sehat, khususnya yang mendorong fungsionalisasi pengembangan pedesaan. Sehingga komponen daerah, baik yang formal maupun yang informal dapat lebih leluasa mengembangkan tanggung jawab, mengambil inisiatif-inisiatif, membuat eksperimen, menciptakan kreasi baru, sehingga semakin memampukan dirinya menyongsong dan membina masa depan, dalam rangka negara kesatuan.

Tanpa keleluasaan semacam ini, sumber daya manusia pedesaan akan tetap menganggur dan buang percuma.

Dan sebagai akibatnya, masyarakat desa tetap dituduh sebagai masyarakat kolot, menghambat pembangunan dan lain-lain cap negatif lainnya, seolah-olah hendak mengatakan bahwa mereka merupakan suatu jenis warga negara yang berkelainan. Penjahat sudah menuduh mereka demikian. Dan suara yang relatif sama juga diambil alih oleh pemimpinnya sendiri dalam alam kemerdekaan.

Sudah saatnya kita menyadari, bahwa mereka hanya menjadi korban kepicingan dan egoisme sang penjahat pada masa silam dan dalam alam kemerdekaan mereka sebenarnya menjadi korban dari penyakit yang sama.

Fungsionalisasi desentralisasi menurut penulis adalah peluang dan keleluasaan untuk mengalami sendiri sesuatu dalam hidup ini. Di mana di dalamnya berlangsung proses pemampuan sumber daya manusia, pendewasaan pribadi dan masyarakat yang pada gilirannya merupakan proses pemerataan tanggung jawab, memikul beban sejarah negara kesatuan yang tercinta ini.

Dalam hubungan ini Gubernur Jawa Timur,¹ Sunandar secara tepat mengemukakan bahwa perlu dikembangkan masyarakat informasional, yaitu masyarakat yang kaya dengan input informasi yang bergizi untuk hidupnya sebagai warga bangsa yang bertanggung jawab; masyarakat informasional di mana semua warganya "well-informed", terus belajar, sehingga sadar akan masalah yang dihadapi bangsanya dan dunia pada umumnya. Dengan bertitik tolak pada budaya dan kepentingan bangsanya sendiri, manusia semacam ini tetap terbuka dan kritis juga kepada dirinya sendiri. Mereka semakin mampu menyaring informasi yang bermakna bagi hidupnya dan bangsanya.

Dalam menyongsong pengaruh-pengaruh yang negatif, baik dari dalam maupun dari luar, maka benteng yang pertama dan terakhir adalah manusia Indonesia itu sendiri. Ditinjau dari segi ini maka warga bangsa yang kebetulan berdiam di desa yang jumlahnya lebih dari 80%, adalah potensi pembina budaya masa depan bangsa. Jumlahnya besar sekali. Karenanya kemampuan potensial mereka juga sangat besar. Untuk menggali potensi ini, diperlukan sikap dan pendekatan mendasar. Seperti yang juga dikemukakan budayawan Sitor Situmorang, bahwa dunia pedesaan adalah titik tolak memandang dan bukan sekedar orientasi dari pembangunan.²

KONDISI KOMUNIKASI DI DESA: BEBERAPA HASIL PENELITIAN

Pada tahun 1977, LIPI mengadakan penelitian sistem komunikasi di desa yang berada di Aceh, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat.³ Dari penelitian ini terdapat kesan bahwa ada tiga sumber utama informasi bagi masyarakat; pertama, dari sumber pejabat/petugas pemerintah; kedua, sumber media massa, baik media siaran maupun media cetak; dan ketiga, sumber dari masyarakat sendiri, seperti ulama, kaum kerabat, tetangga dan sebagainya.

1 *Kompas*, 7 Nopember 1979

2 Sitor Situmorang, Pendekatan Sosial Budaya terhadap Modernisasi Dewasa ini, *Merdeka*, 25 s/d 27 Februari 1980

3 Lihat Ringkasan Hasil Penelitian dari Sistem-sistem Komunikasi dalam masyarakat daerah-daerah tersebut, sebagai Proyek Penelitian Pengaruh Sosial Budaya dari Komunikasi Satelit Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan (LIPI) dan Departemen Penerangan RI, 1977

Dari penelitian itu dapat dilihat bahwa hampir pada semua daerah penelitian media massa sebagai sumber informasi mulai tampak menonjol peranannya jika dibandingkan dengan sumber formal yaitu pejabat ataupun sumber dari masyarakat. Misalnya untuk daerah Aceh, dikatakan sumber dari masyarakat ini tampak lebih unggul dari jumlah kedua sumber lainnya. Walaupun di daerah ini media massa dikatakan kalah dibandingkan dengan informasi dari sumber masyarakat, namun penelitian itupun segera mencatat sesuatu yang sangat menarik. Dikatakan bahwa "media massa khususnya iklan warung/toko terasa pengaruhnya dalam menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru di satu pihak dan di lain pihak terasa pula bahwa masyarakat Aceh terlalu mudah terpicat oleh iklan tersebut. Pola konsumsi berubah jauh lebih cepat mendahului pertumbuhan ekonomi".

Andai kata hasil penelitian LIPI ini ada mengandung unsur kebenaran, maka yang menjadi pertanyaan adalah apa peranan dari kedua sumber informasi lainnya, baik dari sumber yang formal maupun yang berasal dari masyarakat, dalam turut mempengaruhi sikap konsumen tersebut di atas. Masalah menjadi serius kalau gejala yang terjadi di Aceh ini juga berlaku di seluruh tanah air. Maka segera tampak bahwa dalam era pembangunan ini ternyata efek komunikasi merintang proses pembangunan. Mungkin ini tantangan utama dari pembangunan dewasa ini, juga tantangan dari kebijakan komunikasi, termasuk apa yang sering disebut komunikasi pembangunan.

Pada pihak lain penelitian LIPI ini juga menunjukkan bahwa masih begitu banyak potensi sumber informasi yang belum digali. Antara lain misalnya untuk media cetak belum dimanfaatkan saluran informasi melalui selebaran lepas, sebagai sumber informasi yang praktis, murah serta dapat ditempelkan di mana saja, katakan sebagai "koran dinding". Dari sumber formal tampak juga bahwa juru penerangan dan lain-lain badan pemerintah di daerah belum bergairah dan ofensif memberikan informasi yang diperlukan masyarakat desa. Apalagi sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam meluruskan pelbagai pengaruh sampingan negatif dari media massa antara lain seperti yang tersebut di atas. Begitu pula adanya organisasi-organisasi profesi dan lain-lain organisasi sosial juga belum menyentuh kepentingan warga desa dan karenanya informasi dari mereka belum dapat dicatat dalam kalbu warga desa yang diselidiki. Kondisi yang sama juga dialami oleh pelbagai seni tradisional yang sebenarnya ada di mana-mana di negara

ini. Akan tetapi kegiatan yang khas berakar dalam masyarakat ini belum sanggup menyalurkan pesan yang bermakna bagi warganya. Dalam penelitian LIPI ini juga tampak bahwa guru sekolah belum dianggap sebagai sumber informasi di desa. Kalau diingat bahwa profesi ini sering dijuluki sebagai "lumbung pengetahuan", "tempat bertanya" dan sebagainya, oleh masyarakat desa kita di seluruh tanah air, maka gejala melorotnya peranan guru di desa ini seharusnya menarik perhatian. Tentu, saya tidak bermaksud untuk mengembalikan mithos yang kuno di atas secara mutlak, akan tetapi hanya sekedar menunjukkan bahwa guru sekolah di desa ternyata belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi.

Potensi masyarakat desa lain, yang lebih relevan dengan koran masuk desa ialah warga desa yang buta huruf. Dalam penelitian LIPI juga terdapat respondennya yang buta huruf. Untuk Aceh misalnya responden yang buta huruf adalah 42,33%. Jumlah ini sengaja saya ambil, karena lebih mewakili prosentase buta huruf nasional, yang dikatakan 41%. Jelas koran masuk desa bukanlah untuk mereka ini. Begitupun pelbagai kemudahan untuk media cetak berikut subsidi yang mungkin diberikan pada pers, juga bukanlah untuk warga bangsa yang lebih dari 40% ini. Singkatnya koran masuk desa bukan untuk kepentingan mereka, tetapi paling banter untuk kepentingan elite di desa. Itupun terbatas pada mereka yang mempunyai hobi membaca dan mampu membelinya. Karenanya dengan adanya koran masuk desa berikut koran daerah, perpustakaan desa dan lain-lain benda cetak lainnya, maka sebagai tindak lanjut mutlak dilaksanakan perluasan kemampuan membaca dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tanpa usaha pemberantasan buta huruf ini, maka pelbagai benda cetak yang mengalir ke desa, apalagi dengan biaya yang mahal (yang nota bene dibiayai oleh warga yang buta huruf ini juga), hanya akan menimbulkan sakit hati barisan buta huruf ini.

Masalahnya, bagaimana menyiapkan komunikasi sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pembangunan, berikut bagaimana pula menggali potensi yang masih terpendam di desa. Ini membutuhkan tanggung jawab dan kerja sama dari semua pihak, termasuk usaha bersama dalam memberi batas, isi dan kriteria mengenai apa yang dimaksudkan misalnya dengan komunikasi pembangunan.

CATATAN PENUTUP: MASALAH KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Dalam usaha untuk mencari batas, isi dan kriteria dari komunikasi pembangunan ternyata setiap bangsa tidak dihadapkan pada suatu jalan lurus yang sudah pasti arah dan langkahnya begitu pula pemilihannya. Sebaliknya, kita senantiasa berhadapan dengan serangkaian persimpangan jalan yang unik, yang membuat kita selalu dalam posisi yang dilemmatis.¹ Dalam rangka usaha mencari isi, bentuk, gaya dan cara yang tepat mengenai komunikasi pembangunan ada baiknya kita melihat beberapa dari persimpangan jalan tersebut, sehingga bertambah jelas bagi semua pihak bahwa istilah itu dapat mengandung arti yang berbeda bagi setiap orang, sehingga perumusannya tidak semudah pengucapan kata-katanya.

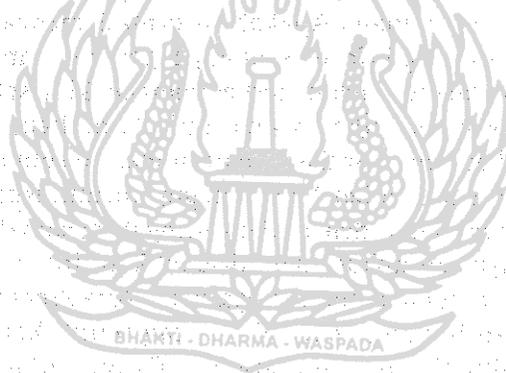
Misalnya orang bertanya, siapa yang mengontrol informasi termasuk pengetahuan. Apakah informasi mengalir dengan bebas atau dibatasi. Lantas, informasi atau pengetahuan apa sebenarnya yang kita perlukan dalam tingkat perkembangan kita sekarang ini. Dan siapa pula yang menentukan semua ini? Kemudian, bagaimana dapat kita menyiapkan masyarakat seluruhnya, terutama yang berdiam di pedesaan agar lambat laun sanggup memutuskan sesuatu yang sesuai atau bertentangan dengan kepentingan nasional misalnya. Bagaimana sebenarnya disiapkan dan disuguhkan informasi untuk memenuhi keragaman budaya kita di negara ini. Apa sebenarnya yang merupakan kebutuhan bersama yang diperlukan untuk komunikasi lintas budaya (*cross-cultural communication*). Dalam rangka ini sejauh mana kebijakan komunikasi dapat didesentralisasi? Lalu, bagaimana menyiapkan suatu masyarakat yang beraneka ragam itu yang akan menerima suatu informasi baru, tanpa harus tergelincir menjadi korban dari akibat sampingannya?

Akhir-akhir ini, juga di Indonesia orang sering omong mengenai komunikasi pembangunan. Dalam menentukan informasi komunikasi sesuai dengan tujuan pembangunan, maka dilema di atas barang kali perlu dikaji, sehingga proses pembangunan termasuk komunikasi pembangunan tidak perlu menjadi musuh dari warganya sendiri. Belum lagi

¹ Everett Kleinjans, *Crossroads in Communication*, Asian Mass Communication Research and Information Centre, Singapore 1971, p. 10-16

diingat efek dari komunikasi yang bersifat nonkomunikasi pembangunan, baik dari dalam maupun dari luar.

Ternyata jawaban tidak mudah. Karenanya diperlukan misalnya kerja sama yang erat antara semua pihak dan kehendak, terutama antara kaum ilmuwan termasuk budayawan, pengambil keputusan dan kalangan komunikator, baik di pusat maupun di daerah. Di samping itu suatu pendekatan jangka panjang juga ialah pengembangan sistem pendidikan yang mengajarkan orang bagaimana belajar sehingga mereka dapat terus belajar, dan pada gilirannya menciptakan masyarakat belajar, sekaligus menyongsong dan membina suatu budaya masa depan yang dinamik serta tanggap terhadap aneka masalah jamannya, di mana martabat manusia seharusnya tetap menjadi mahkotanya. Seharusnya di situlah juga letak dan arah koran masuk desa. Tampak jalan masih sangat panjang. Karena itu diperlukan tindak lanjut yang mendasar dan menyeluruh.



kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka pembinaan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bersifat nonkomunikasi. Komunikasi yang bersifat nonkomunikasi adalah komunikasi yang tidak menimbulkan perubahan pada penerima. Hal ini dapat terjadi karena penerima tidak menyadari adanya komunikasi tersebut.